PERLINDUNGAN HAK CIPTA ILUSTRATOR TERHADAP KARYA SENI DIGITAL DI INDONESIA

Jessica Angel, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: jscangel@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p06>

ABSTRAK

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memahami bagaimana ilustrator dilindungi secara hukum, memperoleh kepastian hukum dan mengambil langkah hukum yang tersedia ketika terjadi pencurian karya seni digital oleh para ilustrator berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Pada artikel ini, metode penulisan yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam studi ini, ditemukan bahwa setiap orang yang menciptakan karya memiliki hak untuk dilindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan UUHC serta beberapa regulasi lainnya terkait kekayaan intelektual. Dalam perspektif hak kekayaan intelektual, para ilustrator memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya seni yang mereka ciptakan. Salah satu pemenuhan hak ilustrator tersebut adalah melalui kepastian hukum dengan diberlakukannya UUHC.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Ilustrator, Karya Seni Digital, Hak Cipta*

ABSTRACT

This article was written with the aim of understanding how illustrators are legally protected, obtain legal certainty and take available legal steps when digital artworks are stolen by illustrators based on Indonesian law. In this article, the research method applied is the normative legal research method. In this research, it was found that everyone who creates works has the right to be legally protected with the regulated of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright and several other regulations related to intellectual property. In the perspective of intellectual property rights, illustrators have the right to obtain legal protection for the works of art they create. One of the illustrators' right fulfillments is through legal certainty with the regulated of Act Number 28 of 2014 concerning Copyrights.

Key Words: *Legal Certainty, Illustrator, Digital Artworks, Copyright.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Segala hal dalam kehidupan manusia masa kini sudah tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan banyaknya bidang dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi termasuk dalam bidang kesenian. Karya seni digital merupakan sebuah contoh nyata dari adanya pengaruh perkembangan teknologi terhadap bidang kesenian. Karya seni digital atau yang sering disebut sebagai ilustrasi adalah sebuah bentuk seni yang berupa gambaran ilustrasi menggunakan teknik menggambar secara digital. Teknik menggambar secara digital sendiri merupakan suatu proses melukis atau menggambar dengan menggunakan alat bantu digital berupa komputer, laptop, tab dan juga pen

tablet.¹ Dengan kata lain, teknik menggambar digital dapat diartikan sebagai suatu metode penciptaan karya seni lukisan berbasis digital yang memiliki bentuk, garis, warna, serta gambar yang berwujud digital. Karya seni digital yang berasal dari teknik menggambar digital merupakan suatu wujud hasil karya cipta modern yang berkembang sangat pesat saat ini. Karya seni digital atau ilustrasi seringkali ditemukan dalam komik digital, buku ilustrasi, *e-flyer* dan lain sebagainya.

Secara etimologis, kata ilustrasi berasal dari Bahasa Latin yakni dari kata *illustrare* yang memiliki arti menjelaskan atau memberi penerangan terkait suatu hal. Selanjutnya secara terminologi, ilustrasi dapat diartikan sebagai gambar yang memiliki sifat serta fungsi untuk memberikan penjelasan terkait suatu peristiwa. Banyak definisi terkait dengan ilustrasi tersebut, menimbulkan beberapa pendapat para ahli terkait dengan arti dari kata ilustrasi itu sendiri. Menurut Fleishmen, ilustrasi merupakan seni yang melibatkan penciptaan gambar, foto atau diagram baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selanjutnya Drs. RM. Soenarto menjelaskan bahwa ilustrasi merujuk pada suatu gambar atau karya grafis yang berfungsi sebagai penghias, tambahan atau penjelas dalam sebuah tulisan untuk membantu pembaca memahami makna yang ingin disampaikan. Sedangkan Dwi Koendara berpendapat bahwa ilustrasi memiliki arti sebagai sebuah hiasan dari suatu peristiwa yang dapat berbentuk kata-kata ataupun gambar yang divisualkan sehingga memberikan kesan estetis.² Berdasarkan beberapa definisi terkait dengan ilustrasi, dapat disimpulkan bahwa karya seni digital atau ilustrasi merupakan sebuah proses hasil kreatifitas seseorang dalam mewujudkan suatu karya seni menggunakan perkembangan teknologi dengan tujuan untuk merepresentasikan suatu hal dan memiliki hasil akhir berupa wujud digital. Seseorang yang menghasilkan sebuah karya seni digital biasanya disebut sebagai ilustrator.

Saat ini, perkembangan karya seni digital di Indonesia sudah mencapai tingkat yang signifikan. Bukti terhadap hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya karya seni digital seperti komik digital, buku ilustrasi, *e-flyer* dan lain sebagainya. Dengan perkembangan karya seni digital yang sangat pesat tersebut, timbul sebuah isu mengenai perlindungan hak cipta ilustrator terkait dengan hasil karya seni digital yang dimilikinya. Setiap pencipta seni digital memiliki hak yang sangat penting yang disebut sebagai hak cipta. Sebagai seorang pencipta karya seni digital, seorang ilustrator harus mengetahui bahwa hak cipta memberikan perlindungan kepada para pencipta karya sebagai pemilik hasil karya seni digital yang dimilikinya.³ Dalam dunia karya seni digital, seringkali ditemukan adanya karya seni digital yang memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan satu dengan yang lainnya. Pencurian atau penjiplakan karya seni digital milik ilustrator tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemilik asli karya seni digital tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pembajakan dan merupakan pelanggaran Undang-Undang. Rawannya pembajakan hasil karya seni digital di Indonesia disebabkan karena adanya keinginan

¹ Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 957-971.

² Maharsi, Indiria. *Ilustrasi*. (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2016), 3-4.

³ Prasetyaningrum, Nurita Elfani, Ramadhian Agus Triono Sudalyo, Kurniawati Darmaningrum, Gesang Kristanto, Evi Dewi Kusumawati, dan Dewi Kartikasari. "Pelatihan Desain Konten Promosi Digital, Pentingnya Hak Cipta Dalam Desain Grafis, dan Cara Menghitung Rencana Anggaran Biaya Desain Grafis Pada Siswa SMK PGRI Sukoharjo." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tunas Membangun* 2, No. 2 (2022): 3.

seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan tersebut. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap produktivitas hingga apresiasi yang diterima ilustrator terhadap karya seni digital miliknya. Dengan adanya permasalahan tersebut, tidak jarang beberapa ilustrator memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena merasa hasil kerja kerasnya tidak dihargai hingga merugikan dirinya sendiri dan malah memberikan keuntungan kepada ilustrator lain. Hal tersebut menyebabkan adanya kebutuhan terkait kepastian hukum perlindungan hak cipta yang dimiliki ilustrator terhadap hasil karya seni digital yang dimiliki oleh para ilustrator tersebut.

Setelah melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian lain yang memiliki topik pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta" yang ditulis oleh Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A. Sri Indrawati dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi,⁴ yang memiliki pokok pembahasan terfokus pada hak ekonomi serta hak moral seorang pencipta karya seni *Electronic Book* (E-Book) dan akibat hukumnya yang dapat dikenakan apabila terjadi penggandaan *Electronic Book* tanpa seizin pencipta karya cipta *Electronic Book*. Sedangkan dalam studi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah sistem perlindungan serta kepastian hukum hak cipta karya seni digital yang dimiliki ilustrator apabila terjadi pencurian karya seni digital berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Disisi lain, studi ini juga mencangkup pembahasan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat penggunaan karya seni digital tanpa persetujuan ilustrator yang memiliki karya seni digital tersebut. Sehingga penulis merasa penting untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat mengakomodir pemenuhan hak cipta karya seni digital yang dimiliki ilustrator.

1.2 Rumusan Masalah

Studi ini akan menjelaskan beberapa isu terkait dengan perlindungan hak cipta karya seni digital di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak cipta karya seni digital berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ilustrator apabila karya seni digitalnya digunakan tanpa izin?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan dilakukan atas dasar untuk menganalisis serta mendalami perlindungan hukum, kepastian hukum serta upaya hukum yang dimiliki serta dapat dilakukan oleh para ilustrator apabila terjadi pencurian karya seni digital yang dimiliki oleh ilustrator berdasarkan aturan hukum di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui serta mengkaji hambatan yang terdapat dari implementasi perlindungan serta upaya hukum terhadap perkara pencurian karya seni digital.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan studi ini, pendekatan penelitian normatif digunakan sebagai metode penulisan artikel. Metode penelitian normatif adalah sebuah pendekatan

⁴ Darmayanti, Ni Putu Utami Indah dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2018).

penelitian berdasarkan studi dokumen, aturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mendalami masalah hak cipta milik seorang ilustrator dalam UUHC. Namun dalam ketentuan UUHC terdapat kekaburan norma dimana masih belum diatur secara pasti apakah karya seni digital atau ilustrasi termasuk kedalam jenis ciptaan yang dapat dilindungi secara hukum atau tidak, sehingga masih terdapat kebingungan ilustrator bila terjadi penjiplakan atau pencurian karya seni digital yang dimiliki oleh seorang ilustrator. Berdasarkan penelitian hukum normatif, sumber hukum yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi merupakan literatur hukum kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan berbagai materi hukum terkait Hak Cipta, Karya Digital dan topik sejenis lainnya. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan penjelasan terkait dengan isu yang akan dibahas, kemudian menganalisis serta mengevaluasi sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan dalam studi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Hak Cipta merupakan hak-hak yang merangkai karya-karya intelektual dalam berbagai aspek seperti aspek ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang diwujudkan dalam wujud yang unik serta sudah diwujudkan secara nyata. Artinya, hak cipta memiliki definisi sebagai suatu hak milik yang dimiliki oleh seorang pencipta karya seni untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan karyanya serta memberikan izin kepada orang lain, tetapi masih harus mematuhi batasan-batasan sebagaimana yang tercantum dalam Hukum yang berlaku.⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC dijelaskan bahwa hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara langsung setelah karya tersebut dibentuk dalam wujud nyata disebut sebagai Hak Cipta. Hak eksklusif tersebut berlaku tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan dalam regulasi yang diterapkan. Sederhananya, hak alami yang memiliki sifat yang absolut dan hak tersebut akan terus dilindungi selama pencipta karya masih hidup hingga beberapa tahun setelahnya disebut sebagai hak cipta.

Berbagai jenis karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta merupakan karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra. Karya-karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk fisik ataupun ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan lain sebagainya.⁶ Apabila suatu karya belum diwujudkan secara fisik atau masih berupa sebuah ide maka karya tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Sehingga agar suatu karya seni mendapatkan perlindungan Hak Cipta dari adanya penjiplakan karya seni maka perlu diwujudkan ide karya seni tersebut menjadi suatu bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan, disentuh dan lain sebagainya. Dengan demikian karya seni yang telah diciptakan akan mendapatkan perlindungan baik secara moral ataupun secara hukum.

⁵ Feriyanto, Mujiyono. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 6.

⁶ Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), 19.

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses pembuatan karya seni telah menggunakan bantuan teknologi seperti pembuatan karya seni digital yang memadukan kemampuan seniman dengan teknologi digital. Teknologi digital tersebut berperan sebagai komponen *output* atau sebagai sarana untuk menghasilkan sebuah karya seni yang berwujud digital.⁷ Pada awal perkembangan karya seni digital, teknologi sangat membantu manusia dalam teknis berkarya. Namun seiring dengan maraknya penggunaan teknologi digital dalam berkarya, hasil dari karya seni digital banyak yang berpotensi melanggar hak eksklusif Pencipta. Hal tersebut menimbulkan berbagai isu terkait dengan perlindungan hak cipta karya seni digital di Indonesia.

Isu terkait perlindungan hak cipta karya seni digital di Indonesia telah menjadi hal yang familiar bagi masyarakat di Indonesia. Bila dikaji lebih dalam lagi, isu perlindungan hak cipta terkait karya seni digital meliputi beberapa hal. Salah satunya adalah mudahnya melakukan reproduksi serta penggunaan karya digital secara terus-menerus. Selain itu, media digital memudahkan modifikasi dan penyebarluasan karya seni digital. Kemudian terdapat kesamaan dari karya seni digital yang beredar di media digital.⁸ Beberapa hal tersebut menyebabkan adanya faktor pendorong untuk mempermudah penggabungan karya seni digital menjadi suatu karya seni baru. Adanya faktor pendorong yang mempermudah masyarakat dalam mengakses serta mengelola karya seni digital yang beredar menyebabkan timbulnya suatu permasalahan baru seperti mudahnya terjadi pencurian karya seni digital atau penjiplakan karya seni digital. Mengambil atau mencuri karya seni digital atau yang sering disebut ilustrasi merupakan tindakan yang dapat merugikan ilustrator atau pencipta asli dari sebuah ilustrasi. Maraknya kasus pencurian ilustrasi menyebabkan terjadinya penurunan jumlah serta kualitas ilustrator yang ada.

Dalam perkembangannya, belum terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan penggunaan metode untuk mengukur apakah suatu karya khususnya karya ilustrasi merupakan hasil penjiplakan atau tidak. Sehingga diperlukan dilakukannya pendekatan untuk dapat menentukan apakah terdapat pelanggaran hak cipta dalam pembuatan karya seni digital tersebut.⁹ Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para seniman untuk memastikan karya seni digitalnya telah dijiplak atau tidak adalah dengan melakukan uji perbandingan terlebih dahulu. Uji perbandingan ini dilakukan dengan cara memfilter atau memilah-milah elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam suatu karya seni digital milik orang lain dengan karya seni digital milih seniman tersebut. Dengan demikian apabila terdapat unsur kesamaan dalam karya seni digital maka dapat dikatakan bahwa suatu karya seni digital tersebut termasuk dalam lingkup pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara jelas bila masing-masing individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hal kehidupan pribadinya, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang dimilikinya. Mereka juga berhak merasakan kenyamanan serta mendapatkan perlindungan dari

⁷ Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli dan Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia." *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 6, No. 1 (2022): 122.

⁸ Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 3 (2016): 345-367.

⁹ Amukti, Enggal Triya, Erna Susanti dan Lily Triyana. "Perlindungan Hak Cipta Seniman Atas Pembajakan Ilustrasi Digital Dalam Bentuk *Non-Fungible Token*." *Journal of Intellectual Property* 6, No. 2 (2023): 102.

ancaman ketakutan.¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum adalah hak alamiah milik masing-masing rakyat Indonesia. Pentingnya perlindungan hak cipta suatu karya seni digital bukan hanya menyangkut dengan keaslian suatu karya seni tersebut melainkan juga mengenai perlindungan hak yang dimiliki seorang pencipta karya seni digital. Diberlakukannya UUHC bertujuan sebagai wujud pemberian perlindungan hukum secara pasti kepada ilustrator serta memastikan bahwa ilustrator mendapatkan hak yang sama dengan pencipta lainnya. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bila Indonesia diatur oleh hukum sebagai sebuah negara hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Tujuan utama negara hukum adalah melindungi rakyat negaranya termasuk perlindungan hukum bagi ilustrator. Pemerintah Indonesia memiliki dua prinsip negara hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, antara lain:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan warga negara dengan memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam mengemukakan keberatan atau pendapat sebelum diambil suatu ketetapan oleh pemerintah disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Secara sederhana perlindungan hukum ini dilakukan untuk menangkal terjadinya perselisihan. Tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa berkelanjutan. Bila dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta karya seni digital, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal pencurian karya seni digital dan mencegah kerugian yang mungkin ditanggung oleh para ilustrator. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya UUHC.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan yang diberikan setelah suatu perkara pelanggaran hak cipta terjadi disebut sebagai perlindungan represif. Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta yang terjadi menggunakan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat Indonesia sebagai wujud dari diberlakukannya prinsip perlindungan akan nilai dan posisi manusia yang muncul dari Pancasila serta ideologi negara hukum. Perlindungan hukum yang memiliki sifat memaksa merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, melalui penerapan denda, penjara dan hukuman lainnya. Apabila hak cipta dilanggar, seorang ilustrator dapat mengambil tindakan hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga apabila karyanya dicuri oleh orang lain yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi ilustrator tersebut. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UUHC dijelaskan bila seorang pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik terkait, tidak memiliki kewajiban untuk mencatat ciptaannya dan produk hak terkait. Sehingga seorang ilustrator tidak harus mendaftarkan karya seni digitalnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Hal tersebut karena

¹⁰ Kurnia, Muhamad Rizki, Nuzul Rahmayani, dan Jasman Nazar. "Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku. Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2023): 159-174.

suatu karya seni sudah dilindungi secara hukum apabila karya seni tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata.

3.2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Ilustrator apabila Karya Seni Digitalnya digunakan Tanpa Izin

Secara umum, pelanggaran hak cipta terjadi akibat adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan segera tanpa memikirkan adanya hak orang lain yang dilanggar. Perbuatan tersebut tentu merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman. Pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi atas beberapa faktor seperti:¹¹

1. Adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tindakan pencurian karya seni.
2. Pelanggar tindakan pencurian karya seni merasa bahwa sanksi hukum yang ada tidak terlalu memberatkan atau bahwa tidak terdapat tindakan pencegahan atau pemidanaan yang cukup memberikan efek jera.
3. Terdapat beberapa ilustrator yang masih merasa bangga bila karya seninya ditiru oleh orang lain karena kurangnya kesadaran hukum terhadap hak cipta yang dimilikinya.
4. Peminat karya seni digital tidak terlalu mementingkan apakah karya seni digital yang dilihatnya adalah karya seni asli atau palsu, yang peminat pentingkan biasanya adalah harga dari karya seni tersebut yang masih terjangkau.

Berdasarkan beberapa faktor diatas, dapat dilihat bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta karya seni digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku melainkan juga terdapat faktor dari ilustrator hingga peminat dari karya seni digital yang ada. Dengan demikian diperlukannya adanya beberapa usaha dan langkah-langkah yang tepat untuk menekan terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Agar dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta karya seni digital, seorang ilustrator dapat melakukan langkah preventif dengan mendaftarkan karya seni digital yang dimilikinya. Dengan melakukan pendaftaran, pencipta akan mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait hak atas karya seni digital yang telah diciptakannya. Sehingga jika suatu saat terjadi pencurian karya seni digital di kemudian hari maka bukti pendaftaran karya seni digital tersebut dapat dijadikan bukti di pengadilan.¹² Selain pendaftaran karya seni digital, upaya lain yang perlu dilakukan oleh pencipta karya seni digital adalah perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan UUHC. Menguasai pengetahuan mengenai UUHC dapat menjadi sebuah bantuan bagi para pencipta karya seni digital untuk memahami hak-hak yang mereka miliki sebagai pencipta dan juga peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya milik seorang pencipta karya seni digital.

Tindakan hukum yang bersifat penindakan atau represif dapat diambil ketika pelanggaran hak cipta telah terjadi. Adapun langkah hukum yang dapat diambil untuk menghadapi situasi pencurian karya seni digital adalah dengan memulai tindakan hukum melalui Pengadilan Niaga. Selain menggunakan proses hukum, berdasarkan pasal 95 ayat (1) UUHC, suatu perkara pelanggaran hak cipta karya seni digital dapat

¹¹ Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 135

¹² Yasa, Ade Hendra, and AA Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2016): 1-5.

diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.¹³ Tidak hanya melalui jalur perdata, perkara hak cipta juga dapat diatasi dengan melibatkan peradilan pidana. Pengaturan hukum terkait pelanggaran hak cipta telah tersusun dalam pasal 112-118 UUHC. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pengajuan gugatan perdata dapat dilakukan secara bersamaan dengan tuntutan pidana. Sebelum mengambil langkah hukum, langkah mediasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan proses penuntutan pidana.

Prosedur untuk melaporkan pelanggaran hak cipta telah dicantumkan dengan jelas pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pelaporan tindak pelanggaran hak cipta serta hak terkait dapat dilakukan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan hukum di pemerintahan dalam bidang hukum. Selanjutnya, pihak yang dapat melaporkan pelanggaran hak cipta dijelaskan dalam ayat (2) yakni pencipta, pemilik hak cipta, pemilik hak terkait, pemilik lisensi hak cipta dan hak terkait, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif, asosiasi dengan wewenang atau pihak lain yang diberikan wewenang.

Segala langkah hukum yang mampu dilakukan menurut UUHC digolongkan menjadi tindak kejahatan yang dilaporkan atau delik aduan. Jika pengadilan perdata memutuskan bahwa sebuah pelanggaran hak cipta terjadi, pelaku pencurian karya seni digital tersebut harus memberikan kompensasi kerugian kepada pemilik asli dari karya seni digital yang terkait. Sedangkan bila pengadilan memutus bahwa ada pelanggaran hak cipta dalam kasus pidana, maka pelaku akan dikenai hukum penjara dan/atau pidana denda.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera serta untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran yang sama di kemudian hari. Dengan demikian diharapkan isu terkait dengan penjiplakan karya seni digital dapat berkurang seiring dengan diberlakukannya ketentuan UUHC di Indonesia.

Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh ilustrator apabila terjadi penjiplakan karya seni digital yang dimilikinya adalah melalui jalur non litigasi. Salah satu langkah non litigasi yang dapat dilakukan oleh seorang ilustrator apabila karya seni digitalnya dijiplak adalah dengan cara melakukan *takedown* atau penghapusan karya seni digital milik ilustrator lain yang menjiplak karya seni digital miliknya. *The Digital Millennium Copyright Act of 1998* merupakan dasar hukum *takedown* atau penutupan konten yang digunakan secara internasional hingga saat ini.¹⁵ Dilakukannya *takedown* pada konten-konten yang melanggar hak cipta ilustrator memberikan wewenang kepada pencipta untuk melakukan pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya seni digital yang dimiliki ilustrator dan pihak yang menjiplak karya seni digital ilustrator tidak bersedia melakukan *takedown* maka ilustrator berhak melakukan gugatan perdata kepada pihak tersebut. Hal ini juga diatur secara jelas

¹³ Ibid.

¹⁴ Sari, Della Septi, Amelia Situmorang, and Reh Bungana. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jambura Journal Civic Education* 3, No. 1 (2023): 242.

¹⁵ Nusantika, Karima Fatma dan Budi Hermono. "Tinjauan Yuridis Karya Seni Penggemar (Fanart) Sebagai Sebuah Ciptaan." *Novum : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 17, No. 1 (2023): 174.

dalam Pasal 55 UUHC Dimana pemerintah memiliki wewenang untuk menutup Sebagian atau seluruhnya konten yang melanggar hak cipta. Namun tindakan tersebut hanya dapat dilakukan pemerintah apabila terdapat laporan atas pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik. Pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh ilustrator ataupun orang lain yang mengetahui terjadinya tindak pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, ketentuan *takedown* atau penutupan konten memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia.

Disisi lain, diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam hal pengambilan karya digital yang ditemukan di internet dengan berbagai tujuan baik untuk kepentingan pribadi hingga kepentingan komersial. Meskipun pengambilan karya seni digital dilakukan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah pelanggaran hak cipta.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat tentang HKI sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta tanpa disadari. Masyarakat perlu melakukan analisis sumber karya seni terlebih dahulu atau meminta izin kepada pencipta karya seni digital sebelum menggunakan karya seni digital yang ditemukan di internet untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil karya seni digital melalui platform atau lembaga penyedia karya seni digital yang sudah berlisensi atau memiliki izin agar terbebas dari pelanggaran hak cipta.

4. Kesimpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan adalah bahwa UUHC adalah sistem perlindungan hukum langsung. Begitu juga yang telah dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC, disebutkan jika Hak Cipta dapat diartikan sebagai suatu hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta secara langsung setelah karya tersebut dibentuk dalam wujud nyata. Hak eksklusif tersebut berlaku tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan dalam regulasi yang diterapkan. Hak ini tidak dapat diganggu gugat, kecuali sesuai dengan pembatasan yang dicantumkan dalam regulasi yang mengatur. Adapun langkah hukum yang mampu dilakukan untuk menanggulangi perkara pencurian karya seni digital adalah melalui pendekatan non-litigasi dan pendekatan litigasi. Segala bentuk langkah hukum yang dapat dilakukan dalam UUHC adalah sebuah tindakan ilegal yang memerlukan pelaporan terlebih dahulu agar dapat ditindaklanjuti oleh hukum. Aturan mengenai pelaporan pelanggaran hak cipta dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 2 Permenkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Feriyanto, Mujiyono. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).
Maharsi, Indiria. *Ilustrasi*. (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2016).

¹⁶ Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 15.

Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023).

Jurnal

- Amukti, Enggal Triya, Erna Susanti dan Lily Triyana. "Perlindungan Hak Cipta Seniman Atas Pembajakan Ilustrasi Digital Dalam Bentuk *Non-Fungible Token*." *Journal of Intellectual Property* 6, No. 2 (2023).
- Darmayanti, Ni Putu Utami Indah dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (*E-Book*) : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2018).
- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli dan Rika Ratna Permata. "Masa Depan Hak Cipta : Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia." *CITIZEN : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 6, No. 1 (2022).
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021).
- Kurnia, Muhamad Rizki, Nuzul Rahmayani, dan Jasman Nazar. "Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku. Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2023).
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).
- Nusantika, Karima Fatma dan Budi Hermono. "Tinjauan Yuridis Karya Seni Penggemar (*Fanart*) Sebagai Sebuah Ciptaan." *Novum : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 17, No. 1 (2023).
- Prasetyaningrum, Nurita Elfani, Ramadhian Agus Triono Sudalyo, Kurniawati Darmaningrum, Gesang Kristanto, Evi Dewi Kusumawati, dan Dewi Kartikasari. "Pelatihan Desain Konten Promosi Digital, Pentingnya Hak Cipta Dalam Desain Grafis, dan Cara Menghitung Rencana Anggaran Biaya Desain Grafis Pada Siswa SMK PGRI Sukoharjo." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tunas Membangun* 2, No. 2 (2022).
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021).
- Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 3 (2016).
- Sari, Della Septi, Amelia Situmorang, and Reh Bungana. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Penulisan di Aplikasi Digital (*Wattpad*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jambura Journal Civic Education* 3, No. 1 (2023).
- Yasa, Ade Hendra, and AA Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.